



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 309 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 725 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Nomor : 520/198-Sekr.Umpeg/DKP3/2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2023 maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 725 Tahun 2021 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 725 Tahun 2021 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Kasubag. Perencanaan	Kasubag. Hukum	Kepala SKPL
	4	h

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

Jumlah Perundang-undangan	Tahun 2022	Kumulatif
	4	8

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 725 Tahun 2021 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 April 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 309 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN WALI
 KOTA BANJARMASIN NOMOR 725 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
1	IIS SYACHRIL, A.Md NIP.198705052010012012	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	MEILANI DEWI, A.Md NIP.198205272005012012	BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
3	BAIHAQI, S.E NIP.198507292010011011	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	ARKANI NIP.198009092012121004	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
5	MUKHRIZATI JULAIHA, S.E NIP.198212022010012009	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KESEHATAN
6	ELIS ERIYANTI NIP.197804032007012016	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	NOORYADI RAKHMAN, S.STP NIP.199111132014061001	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	SUSANTI NIP.197604252009012001	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PERHUBUNGAN
9	ETTY YULIANA, S.E. NIP.198407282010012014	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
10	M. ANNURI RAHMAN, A.Md NIP.198905312010011001	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
11	LISA APRIMAYANI, S.E NIP.198105012008012036	BENDAHARA PENERIMAAN SEKRETARIAT DAERAH
12	YESSI LESTARI, A.Md NIP.197912122010012017	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
13	IRMA IRYANI, A.Md NIP. 198912292015022005	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA